Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)
e-ISSN:2684-8082 Vol. 1 No.2, Agustus 2019 (88-103) doi: 10.24198/padjir.v1i2.26124

Bantuan Australia untuk Konstruksi dan Perluasan Sekolah Menengah Pertama melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (2011-2016) dalam Mendukung Pembangunan Pendidikan di Indonesia

Annisa Prima Ramadhina
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;
email: annisa15008@mail.unpad.ac.id
Teuku Rezasyah
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;
email: teuku,rezasyah@unpad.ac.id
Dina Yulianti
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;
email: dina.yulianti@unpad.ac.id

Dikirim: 1 Juli 2019 | Direvisi: 10 Agustus 2019 | Diterima: 26 Agustus 2019 | Dipublikasikan: 31 Agustus 2019

Keywords
Australia, Australia's Education Partnership with Indonesia, Education Development, Foreign Aid, Indonesia

ABSTRACT
This research aims to describe the Australian aid for the Construction and Expansion of Junior Secondary School in Bogor Regency through Australia's Education Partnership with Indonesia in supporting education development in Indonesia. The applied concepts in this research are foreign aid of Lancaster and aid chain of Morse and McNamara. In studying the aspects of partnership, researchers uses the four dimensions of partnership from Demirjian. Furthermore, to examine aspects of educational development, researchers uses the definition of international development from Sumner and Triber and the relationship in educational development from McCowan and Unterhalter. This research method is qualitative by collecting data through interviews with relevant parties and literature study. The result of this study indicates that the Australia's Education Partnership with Indonesia is based on Australia and Indonesia's shared goals for education development. The partnership is carried out by giving grants and technical assistance. The achievements of the Construction and Expansion of Junior Secondary School program in Australia's Education Partnership with Indonesia shows that the assistance from Australia contributes to the development of education in Indonesia, especially in the effort to achieve Nine-Year Compulsory Education.

Kata Kunci
Bantuan Luar Negeri, Australia, Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, Indonesia, Pembangunan Pendidikan

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan tentang bantuan Australia untuk Konstruksi dan Perluasan SMP di Kabupaten Bogor melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah konsep bantuan luar negeri dari Lancaster dan rantai bantuan menurut Morse dan McNamara. Selain itu, dalam mengkaji aspek kemitraan, peneliti menggunakan empat dimensi konsep kemitraan dari Demirjian. Untuk mengkaji aspek pembangunan pendidikan, peneliti menggunakan definisi pembangunan internasional dari Sumner dan Triber dan hubungan dalam pembangunan pendidikan dari McCowan dan Unterhalter. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan pendidikan Australia-Indonesia didasari pada tujuan bersama Australia dan Indonesia di bidang pembangunan pendidikan. Kemitraan dilaksanakan dalam bentuk pemberian hibah serta bantuan teknis. Capaian dari program Konstruksi dan Perluasan SMP dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia menunjukkan bahwa bantuan dari Australia berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam upaya mencapai Wajib Belajar Sembilan Tahun.

PENDAHULUAN

Hubungan bilateral Australia dan Indonesia memiliki nilai penting bagi kedua negara. Kekuatan dari hubungan ini akan mendatangkan keuntungan bagi kedua negara, baik dari dimensi strategis, politik, ekonomi, maupun budaya. Hubungan yang rumit dan sensitif di antara kedua negara lahir dari perbedaan dalam sejarah, demografi, dan latar belakang budaya. Meskipun pernah mengalami masa-masa ketegangan, sebagian besar hubungan antara Australia dan Indonesia bersifat positif dan memiliki nilai yang saling menguntungkan (The Parliament of the Commonwealth of Australia, 2004).

Luas wilayah, posisi geostrategis, dan besarnya populasi Indonesia menjadi alasan mengapa Australia memandang Indonesia sebagai mitra yang sangat penting. Indonesia adalah pasar ekspor terbesar ke-10 bagi Australia. Indonesia menjadi bagian dari jalur transit bagi perdagangan Australia ke berbagai penjuru dunia. Di berbagai bidang lainnya, Indonesia juga menjadi mitra kerja sama yang penting bagi Australia, misalnya di bidang pertanian, pendidikan, pariwisata, pengontrolan perbatasan, dan banyak lagi (The Parliament of the Commonwealth of Australia, 2004).

Nilai penting dan strategis Indonesia itu membuat Australia memberikan berbagai dukungan kepada Indonesia melalui bantuan keuangan dan program pembangunan. Sebagian besar dukungan Australia kepada Indonesia diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan resmi. Program pembangunan bilateral Australia untuk Indonesia adalah yang terbesar kedua bagi Australia, hal ini mencerminkan pentingnya hubungan antara kedua negara tersebut. Bantuan pembangunan diberikan oleh Australia melalui badan Australian Aid (AusAID), yang program-programnya berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan (The Parliament of the Commonwealth of Australia, 2004).

Sebaliknya, bagi Indonesia, bantuan dan dukungan dari Australia juga memiliki arti penting. Meskipun Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, dan merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang termasuk dalam kelompok negara G-20, serta berhasil

mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, namun masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kemiskinan erat kaitannya dengan pendidikan, dan keduanya saling berhubungan terbalik. Semakin tinggi pendidikan penduduk, maka semakin berkurang jumlah orang miskin, karena pendidikan menanamkan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung upah yang tinggi (Awan, et al., 2011).

Sistem pendidikan di Indonesia menggunakan pola 6-3-3, yang berarti 6 tahun pendidikan di sekolah dasar (SD), 3 tahun sekolah menengah pertama (SMP), dan 3 tahun sekolah menengah atas (SMA). Pada tahun 2011, tingkat partisipasi siswa SD adalah sebesar 95,55%, tetapi tingkat partisipasi ini menurun untuk SMP menjadi 77,71% dan untuk SMA menjadi 57,74% (ASEAN, 2013). Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa tingkat partisipasi siswa di Indonesia terus menurun seiring dengan semakin tinggi tingkat pendidikannya. Selain itu, hasil dari tes berstandar internasional menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tetap menjadi masalah serius (Australian DFAT, 2013).

Meskipun menghadapi berbagai masalah dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Komitmen Indonesia dalam bidang pendidikan terlihat dengan keterlibatan Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Millenium Development Goals*/MDGs), yang memperkuat komitmen pemerintah terhadap pendidikan dan untuk mencapai akses merata bagi seluruh anak Indonesia. Bahkan, pemerintah Indonesia bertekad untuk mencapai target yang lebih tinggi dibandingkan dengan target global MDGs. Target pemerintah Indonesia yaitu "Wajib Belajar Sembilan Tahun", sementara target MDGs adalah pendidikan setara enam tahun (UNDP Indonesia, 2008).

Menanggapi Renstra 2010-2014 dan Wajib Belajar Sembilan Tahun, pemerintah Australia menunjukkan dukungan terhadap pemerintah Indonesia dengan merancang program bantuan pendidikan baru, meneruskan kemitraan yang telah dijalin sebelumnya antara Australia dan Indonesia dalam sektor pendidikan (Australian DFAT, 2010). Pemerintah Australia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menargetkan programnya sehingga selaras dengan prioritas pemerintah, yang dalam hal ini adalah Renstra 2010-2014, dan untuk mendukung Indonesia agar memenuhi MDGs (Australian DFAT, 2013).

Dukungan pemerintah Australia untuk tahun 2011-2016 berupa Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, yang akan membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai prioritas Renstra melalui kontribusi pada Program Pendukung Sektor Pendidikan Indonesia (*Education Sector Support Program*/ESSP). Dukungan pemerintah Australia dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia melalui AusAID akan dikirimkan sebagai dukungan anggaran khusus, dengan bantuan teknis dan dana hibah untuk membantu pendidikan di Indonesia (Australian DFAT, 2010).

Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia diimplementasikan selama periode lima tahun, yaitu dari tahun 2011 hingga 2016 , dan terdiri dari empat komponen, yaitu: (1) Konstruksi dan/atau perluasan sekolah menengah pertama; (2) Pengelolaan sekolah dan kabupaten/kota – Mutu Pendidikan; (3) Akreditasi Madrasah, dan; (4) Kemitraan Pengembangan Analisa dan Kapasitas. Komponen 1 dan 2 mewakili bagian utama (81%) dari investasi Kemitraan Pendidikan sebesar AUD 500 juta, dengan mayoritas pendanaan yang disampaikan dalam bentuk dukungan anggaran yang dialokasikan untuk mitra kementerian utama, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Sementara itu, komponen 3 yang didukung oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan memanfaatkan model dukungan layanan langsung. Sedangkan komponen 4 mengambil bentuk kontribusi pendanaan untuk kegiatan multilateral yang dikelola oleh Asian Development Bank (ADB). Komponen 3 dan 4 mewakili 9% dan 5% dari nilai investasi (EP Performance Oversight and Monitoring, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian pada komponen 1 yaitu konstruksi dan/atau perluasan sekolah menengah pertama. Dalam komponen 1, Pemerintah Australia mendukung Kemdikbud untuk membangun hingga 1.155 unit SMP dengan maksud menciptakan ruang untuk 160.000 siswa baru (EP Performance Oversight and Monitoring, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan rujukan adalah Eldridge (1971) dan Davis (2006) yang menjelaskan bantuan luar negeri Australia dalam kerangka Kebijakan Luar Negeri dan kepentingan nasionalnya. Sementara itu, Lisbet (2013), membahas mengenai peningkatan kerja sama internasional sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan yang terdapat di dalam MDGs. Penelitian ini diharapkan akan memberikan pembuktian empiris mengenai bantuan luar negeri yang diberikan Australia kepada Indonesia di bidang pendidikan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam buku *International Development Studies: Theories and Methods in Research and Practice*, Sumner dan Triber (2008) mengemukakan tiga perspektif untuk mendefinisikan konsep ‘pembangunan’. Salah satunya, yaitu perspektif kedua, berkaitan dengan kebijakan dan bersifat evaluatif atau dipimpin oleh indikator tertentu, didasarkan pada penilaian, dan memiliki tujuan berjangka pendek hingga menengah, contohnya adalah pembangunan sebagai MDGs. Karakteristik perspektif ini yaitu bahwa perspektif ini berfokus pada hasil dari perubahan sehingga memiliki pandangan yang relatif berjangka pendek. Perspektif ini memandang pembangunan berlangsung dalam serangkaian ‘indikator kinerja’ (berupa tujuan atau hasil) berjangka pendek hingga menengah, yang dapat diukur dan dibandingkan dengan target-target tertentu. Oleh karena itu, perspektif ini memiliki komponen yang lebih instrumental sehingga kemungkinan lebih disukai oleh praktisi pembangunan, khususnya dalam badan-badan pembangunan internasional (Sumner & Tribe, 2008).

Dalam buku *Education and International Development: An Introduction*, McCowan dan Unterhalter (2015) menjelaskan konsep pendidikan dalam pembangunan internasional dengan terlebih dahulu mendefinisikan istilah ‘pendidikan’. Pendidikan dipahami terdiri dari semua tingkatan pendidikan formal, dari tahun-tahun awal, melalui pendidikan dasar dan menengah hingga universitas, serta pendidikan non-formal dengan orang dewasa, dan dalam kasus tertentu bentuk pembelajaran lebih luas dalam masyarakat (McCowan & Unterhalter, 2015).

Terdapat dua hubungan utama yang dapat diobservasi antara pendidikan dan pembangunan internasional. Pertama, bahwa pembangunan mencakup pendidikan, di mana pendidikan merupakan sebuah bagian dari pembangunan. Dalam hubungan ini, pendidikan dipandang sebagai salah satu lembaga masyarakat yang bertambah baik seiring dengan tingkat pembangunan suatu negara. Kedua, bahwa pendidikan mendorong pembangunan. Dalam hubungan ini, proses pembangunan secara luas didukung oleh, dan bergantung pada, pembangunan. Tingkat pendidikan suatu masyarakat dianggap menentukan pertumbuhan ekonomi, demokratisasi, dan berbagai hasil positif lainnya. Dalam praktiknya, kedua hubungan ini saling berkaitan, di mana peran pendidikan dalam mendorong pembangunan menjadi pembenaran politik dan ekonomi akan penyediaan pendidikan, dan pada akhirnya

menjadi sebuah siklus (McCowan,& Unterhalter,2015).

Menurut Lancaster (2007), bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai bentuk transfer sukarela sumber daya publik dari suatu pemerintah ke pemerintah lainnya, ke suatu organisasi nonpemerintah, atau ke suatu organisasi internasional dengan setidaknya 25% elemen hibah, dengan salah satu tujuannya untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di negara penerima bantuan. Bantuan luar negeri bisa dalam bentuk uang tunai (hibah atau pinjaman lunak), dalam bentuk barang (contohnya, bantuan makanan), atau dalam bentuk keringanan utang. Bantuan luar negeri dapat mendanai beragam kegiatan, mulai dari proyek investasi dan kegiatan penelitian, program reformasi ekonomi atau politik, saran serta pelatihan teknis, dan bantuan kemanusiaan (Lancaster, 2007).

Gambar 1. Rantai Bantuan *(Aid Chain)*

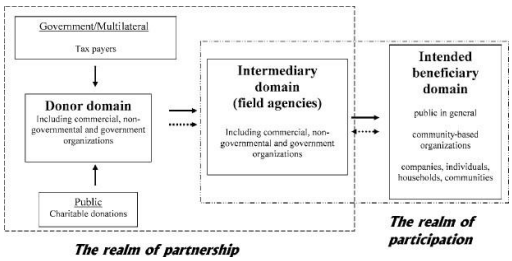

Sumber: Morse & McNamara, 2006: 321

Berdasarkan Morse dan McNamara (2006), rantai bantuan yang menghubungkan donor dan penerima manfaat dapat disimpulkan secara sederhana dalam gambar di atas. Kotak di sebelah kiri adalah donor, yang di tengah adalah 'perantara' atau lembaga lapangan, dan yang di kanan adalah penerima manfaat yang dituju. Istilah 'kemitraan' sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pihak donor dan lembaga perantara, sedangkan istilah 'partisipasi' sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara lembaga perantara dan penerima manfaat. Masing-masing pihak dalam gambar tersebut dapat terdiri dari beragam organisasi, dan dapat berupa organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations*/ NGOs), organisasi pemerintah (*Governmental Organizations*/GOs), atau pihak komersil (Morse & McNamara, 2006).

Demirjian (2002) dalam tulisannya Partnering in Support of International Development Initiatives: The INTOSAI Case Study menyatakan bahwa konsep kemitraan telah digunakan dalam upaya menyusun kembali hubungan antara negara penerima dan negara donor berdasarkan hak dan tanggung jawab bersama serta adanya hubungan timbal balik. Meskipun dalam praktiknya mungkin terdapat ketidaksetaraan, yang ditekankan adalah adanya saling ketergantungan antara negara maju dan berkembang. Dalam memahami hubungan ini, satu mitra dapat membawa sebagian besar pembiayaan dalam program terkait, namun masing-masing mitra dipandang membawa sesuatu yang bernilai dan diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

Demikian mendefinisikan kemitraan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja secara kolaboratif menuju tujuan bersama, dan di dalamnya terdapat empat dimensi, yaitu sebagai berikut.

(1) Pembagian Kerja, Tanggung Jawab, dan Akuntabilitas.

Pembagian kerja (division of labour) berarti identifikasi dan penyutujuan akan siapa yang melakukan tugas apa. Namun, yang harus dipertimbangkan adalah keseimbangan di antara tanggung jawab yang berbeda, di mana pemerintah negara penerima bantuan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan kemanjuran programnya, serta atas semua program pembangunan di negaranya.

Sementara itu, pemerintah negara donor memiliki tanggung jawab kepada pembayar pajak dan pimpinan organisasi mereka atas penggunaan dana dan usaha. Manajemen kemitraan yang baik mengharuskan adanya mekanisme untuk

e-issn: 2684-8082; Vol. 1 No. 2, Agustus 2019 (88-103) doi: 10.24198/padjir.v1i2. 26124

memastikan pemantauan dan evaluasi yang efektif, melaporkan hasil serta ketentuan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

(2) *Investasi Sumber Daya Bersama*

Pentingnya melihat adanya investasi bersama atas sumber daya adalah untuk menggarisbawahi bahwa masing-masing pihak membawa sesuatu yang bernilai dan memiliki sesuatu yang dipertaruhkan dalam hubungan kemitraan. Dimensi ini berkontribusi pada rasa tanggung jawab dan "kepemilikan" *(ownership)* di pihak pemerintah negara penerima dan komunitas masyarakat negara berkembang, yang pada gilirannya menentukan efektivitas bantuan pembangunan.

(3) Berbagi Pengambilan Risiko

Adanya pembagian risiko menyiratkan bahwa para pihak yang terlibat harus bersama-sama mengidentifikasi dan mengakui risiko yang diantisipasi dan setuju untuk bersama-sama mengambil langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko ini. Hal penting dari manajemen risiko yang harus melibatkan semua mitra adalah pemantauan dan evaluasi selama penerapannya. Tidak hanya sekedar mengantisipasi risiko pada awal program dan mengevaluasi pada akhir, namun juga membuat penyesuaian yang berkelanjutan dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif;

(4) Keuntungan Bersama

Identifikasi keuntungan masing-masing memungkinkan para pihak untuk secara eksplisit berfokus pada hasil yang diharapkan dari kemitraan dan keuntungan yang dapat diperoleh darinya.

METODE RISET

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan program Konstruksi dan Perluasan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia sebagai objek analisis. *Level of analysis* yang digunakan oleh peneliti adalah level negara, yang berfokus pada kemitraan yang berlangsung antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian Konstruksi dan Perluasan Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia

Konstruksi dan Perluasan SMP dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia dari tahun 2011-2016 berkontribusi dalam perluasan akses Kemdikbud dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun, termasuk penyediaan akses untuk anak yang berkebutuhan khusus. Pemilihan lokasi konstruksi sekolah bertujuan untuk berkontribusi terhadap penurunan jumlah kabupaten dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP kurang dari 95%. Konstruksi sekolah dilaksanakan dengan mekanisme partisipasi masyarakat, dan difokuskan di daerah miskin, terpencil, terisolasi, dan kurang terlayani (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016).

Tabel 1. Realisasi Pembangunan Sekolah Tahun 2011-2015

Program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia (KPAI)

Komponen 1: Realisasi Pembangunan Sekolah Tahun 2011-2015

No	FY	Jumlah Sekolah			R Kelas	Kapasitas (Bangku)
		USB	Satap	Total		
1	2011	-	-	-	-	-
2	2012	115	336	451	1.698	54.336
3	2013	166	150	316	1.446	46.272
4	2014	131	107	238	1.107	35.424
5	2015	70	80	150	660	21.120
6	Total	482	673	1.155	4.911	157.152

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 1, dukungan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia dalam

Konstruksi dan Perluasan SMP Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia berhasil membangun sebanyak 1.155 unit sekolah. Dari 1.155 unit sekolah yang berhasil dibangun, 482 di antaranya merupakan Unit Sekolah Baru (USB) dan 673 merupakan Sekolah Satu Atap (SATAP). Melalui dukungan ini, berhasil tersedia sebanyak 4.911 ruang kelas baru, atau sebanyak 157.152 bangku sekolah bagi anak-anak berusia SMP (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016).

Grafik 1. Peningkatan APK, Kabupaten/Kota Tuntas Nasional, Tahun 2006-2015

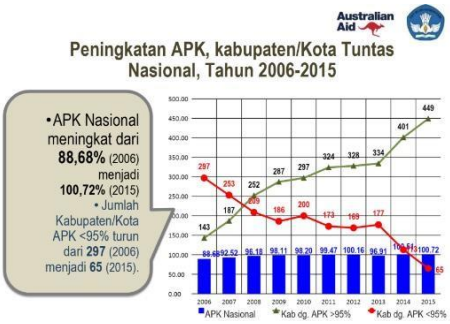

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016

Dalam Grafik 1, dengan bertambahnya jumlah bangku sekolah bagi anak-anak berusia SMP, maka Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP tingkat nasional juga ikut meningkat. APK Nasional yang semula pada tahun 2011, awal berlangsungnya Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, sebesar 99,47%, meningkat menjadi sebesar 100,72% pada tahun 2015. Jumlah Kabupaten/Kota dengan APK kurang dari 95% juga ikut menurun, yang semula berjumlah 173 Kabupaten/Kota pada tahun 2011, menjadi 65 Kabupaten/Kota pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sekolah- sekolah baru hasil Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia di berbagai kabupaten/kota di Indonesia, berhasil mendukung Wajib Belajar Sembilan Tahun dengan berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi siswa SMP dan penurunan jumlah Kabupaten/Kota dengan tingkat APK kurang dari 95% (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016).

Pelaksanaan Konstruksi dan Perluasan Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia sebagai Wujud Bantuan Luar Negeri Australia di Indonesia

Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia merupakan bantuan luar negeri Australia yang bersifat bilateral dan diberikan dalam bentuk hibah dan bantuan teknis kepada Indonesia melalui hubungan kemitraan. Kemitraan pendidikan ini merupakan dukungan Australia kepada Indonesia yang dibangun berdasarkan pengalaman kemitraan kedua negara selama lima tahun sebelumnya dalam sektor pendidikan, yaitu dalam program Australia-Indonesia Basic Education Program (AIBEP) (Australian DFAT, 2010). Setelah selesai dengan program AIBEP yang berlangsung dari tahun 2006-2010, Pemerintah Australia kembali membantu Pemerintah Indonesia dalam rangka Dukungan Sektor Pendidikan (Education Sector Support/ESSP) melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2015).

Pemberian bantuan luar negeri Australia dalam bentuk program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia bertujuan untuk membantu pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan di Indonesia. Pemerintah Australia percaya bahwa pendidikan yang baik akan mendorong masyarakat secara seluruhnya, meningkatkan prospek perekonomian Indonesia, dan membuat tenaga kerja yang kompetitif (Saad, 2019). Selain itu, hubungan kemitraan bilateral antara Australia dan Indonesia juga mempengaruhi dibentuknya Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, di mana pendidikan merupakan salah satu kontribusi utama Australia untuk Indonesia. Australia

berfokus meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang pada akhirnya

e-issn: 2684-8082; Vol. 1 No. 2, Agustus 2019 (88-103) doi: 10.24198/padjir.v1i2. 26124

diharapkan akan berkontribusi di ranah regional dan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Adam, 2019).

Pelaksanaan bantuan luar negeri Australia melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia sesuai dengan definisi Lancaster (2007) mengenai bantuan luar negeri. Dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, Australia memberikan bantuan untuk Konstruksi dan Perluasan SMP dalam bentuk hibah murni serta bantuan teknis, dengan tujuan mendukung Pemerintah Indonesia mencapai program Wajib Belajar Sembilan Tahun, yang merupakan salah satu aspek pembangunan pendidikan di Indonesia. Dilaksanaannya Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia mencerminkan solidaritas internasional sebagai nilai yang dianut oleh negara Australia, terutama dalam upaya mewujudkan salah satu tujuan MDGs yaitu Pendidikan Dasar untuk Semua (AusAID, 2006).

Gambar 2. Rantai Bantuan dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia

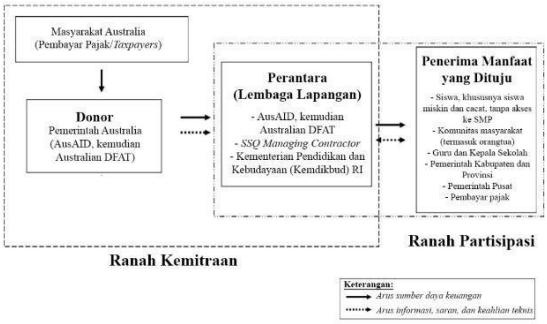

Sumber: Peneliti, 2019

Berdasarkan rantai bantuan yang diilustrasikan oleh Morse dan McNamara (2006), yang menggambarkan hubungan donor hingga penerima manfaat, peneliti mencoba menggambarkan rantai bantuan sebagaimana yang berlangsung dalam Kemitraan Pendidikan Australia pada komponen Konstruksi dan Perluasan SMP. Seperti yang terlihat pada Gambar 5.1., peneliti mengilustrasikan hubungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam komponen Konstruksi dan Perluasan SMP Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia. Dalam rantai bantuan menurut Morse dan McNamara (2006), dalam bantuan luar negeri dapat dibagi menjadi dua ranah, yakni ranah kemitraan dan ranah partisipasi (Morse & McNamara, 2006).

Dalam ranah kemitraan, hubungan yang disorot adalah hubungan antara pihak donor dan perantara, atau lembaga lapangan. Dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, pihak donor merupakan Pemerintah Australia, khususnya lembaga bantuan luar negerinya AusAID atau Australian DFAT, yang pendanaannya diterima dari pajak yang dibayar oleh masyarakat Australia. Sedangkan pihak perantara atau lembaga lapangan dalam kemitraan yaitu: (1) AusAID atau Australian

DFAT; (2) SSQ Managing Contractor; dan (3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI. Dalam ranah kemitraan antara pihak donor dan perantara, Pemerintah Australia melalui AusAID atau Australian DFAT memberikan sumber daya keuangan serta informasi, saran, dan keahlian teknis kepada pihak perantara. Bantuan Australia dalam komponen Konstruksi dan Perluasan SMP disampaikan melalui gabungan dari bantuan teknis dan dukungan anggaran bagi Kemdikbud. Dukungan anggaran ini mewakili investasi terbesar di antara seluruh komponen Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, yaitu sebesar AUD 179,3 juta atau 49% dari total nilai kemitraan pendidikan (EP Performance Oversight and Monitoring, 2013). Pemerintah Australia juga akan melibatkan bantuan teknis di bawah SSQ Managing Contractor untuk mendukung Kemdikbud menerapkan prinsip konstruksi sekolah berbasis partisipasi masyarakat (Australian DFAT, 2010).

Dalam ranah partisipasi, hubungan yang disorot adalah hubungan antara pihak perantara dan penerima manfaat yang dituju. Menurut Australia's Education Partnership with Indonesia Design Document, dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, penerima manfaat yang dituju meliputi: (1) siswa, khususnya siswa miskin dan

berkebutuhan khusus, tanpa akses ke SMP; (2) komunitas masyarakat, termasuk orangtua siswa; (3) guru dan Kepala Sekolah; (4) Pemerintah Kabupaten dan Provinsi; (5) Pemerintah Pusat, termasuk Kemdikbud RI; dan (6) pembayar pajak. Penerima manfaat ini akan menerima bantuan dari pihak donor melalui adanya pihak perantara atau lembaga lapangan, yang melanjutkan dukungan anggaran dan bantuan teknis yang sebelumnya diterima dari pihak donor. Sementara itu, penerima manfaat juga dapat ikut terlibat dalam arus pemberian informasi, saran, dan keahlian teknis kepada pihak perantara. Dalam komponen Konstruksi dan Perluasan SMP pada Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, Pemerintah Kabupaten bersama dengan Kemdikbud yang dibantu oleh SSQ Managing Contractor ikut berperan dalam penentuan lokasi sekolah yang akan dibangun. Selanjutnya, masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah akan mengelola konstruksi sekolah tersebut, dengan bantuan teknis dari SSQ Managing Contractor (Australian DFAT, 2010). Sehingga, dalam ranah partisipasi, penerima manfaat yang dituju juga turut berpartisipasi dalam kesuksesan program ini.

Seperti yang tercantum dalam White Paper on the Australian Government's Overseas Aid Program 2010, bantuan luar negeri Australia akan diberikan dalam bentuk kemitraan. Pemerintah Australia akan menggunakan bantuan luar negeri untuk menjangkau negara-negara dalam kawasannya dan mengerahkan kemitraan yang dapat mendorong hubungan yang lebih kuat antara Pemerintah Australia dan pemerintah negara-negara tetangganya. Program bantuan yang dimiliki dan didorong oleh negara-negara mitra memiliki kecenderungan yang lebih baik dalam hal keberlanjutan. Australia akan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dalam Paris Declaration on Aid Effectiveness, dan mencari peluang untuk menggunakan proses dan sistem yang dimiliki oleh negara mitra dalam proses penyampaian program bantuan luar negeri (AusAID, 2006).

Bantuan Australia untuk Konstruksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia ditinjau dari Konsep Kemitraan

Selanjutnya, peneliti akan menganalisis empat dimensi dari konsep kemitraan untuk pembangunan menurut Demirjian (2002) dalam bantuan Australia untuk Konstruksi dan Perluasan SMP melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia.

a. Pembagian Kerja, Tanggung Jawab, dan Akuntabilitas

Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia melibatkan Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia dan SSQ Managing Contractor dalam penyelenggaraannya. Ketiga pihak ini memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam hubungan kemitraan yang dijalin. Berdasarkan Australia's Education Partnership with Indonesia Design Document, peran pemerintah Indonesia dalam Kemitraan Pendidikan Australia- Indonesia yaitu: (1) Menetapkan keseluruhan kebijakan, anggaran, dan kerangka kerja kinerja untuk sektor pendidikan melalui Renstra, dengan tanggung jawab bagi otoritas tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan sekolah; (2) Penyampaian komponen 1 dan 2 melalui Kemdikbud, Kemenag, dan otoritas tingkat subnasional dan sekolah terkait, termasuk di dalamnya menetapkan pedoman kebijakan, mengelola basis data, mempekerjakan komite pengembangan masyarakat untuk memverifikasi hasil konstruksi, mengelola sistem penanganan pengaduan, dan menindaklanjuti dugaan korupsi; (3) Penyampaian Komponen 3 melalui Kemenag dan otoritas tingkat subnasional dan sekolah terkait; (4) Manajemen dan kepegawaian Sekretariat GOG dan TOGs; (4) Pemantauan dan pengumpulan data untuk ESSP Joint Results Framework; (5) Tanggung jawab fidusia dan pelaporan pengeluaran sekitar

AUD 381 juta yang dikirim melalui sistem Indonesia dan sekitar AUD 35 juta dalam bentuk hibah kepada lembaga-lembaga Indonesia; dan (6) Keterlibatan dalam pemilihan kontraktor pengelola bantuan (Australian DFAT, 2010).

Kemudian, berdasarkan Australia's Education Partnership with Indonesia Design Document, peran Australia dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia yaitu: (1) Melakukan dialog kebijakan tentang pencapaian dan hambatan dalam pencapaian Renstra Indonesia; (2) Pemantauan kinerja program terhadap Renstra, ESSP Joint Results Framework, dan target masing-masing komponen; (3) Melakukan dialog dan koordinasi dengan semua donor yang terlibat dalam sektor pendidikan; (4) Memastikan koherensi dan keseluruhan manajemen dari tiga kontraktor yang terlibat, Asian Development Bank (ADB), dan hubungan mereka dengan pemerintah; (5) Memberi dukungan terhadap Sekretariat Kemdikbud sebagaimana diperlukan; (6) Membangun hubungan lintas program dengan program bantuan Australia lainnya; (7) Memberi informasi dan pengarahan mengenai kinerja program; dan (8) Melakukan evaluasi mandiri (Australian DFAT, 2010). Pemerintah Australia, dalam hal ini AusAID dan kemudian Australian DFAT, bertanggung jawab kepada masyarakat Australia yang merupakan pembayar pajak, di mana pajak yang mereka bayar merupakan sumber dana bantuan luar negeri Australia (Saad, 2019).

Dalam komponen Kontruksi dan Perluasan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pihak Australia tidak terjun secara langsung, namun mereka mempekerjakan kontraktor bantuan. Menurut Australia's Education Partnership with Indonesia Design Document, kontraktor bantuan akan membantu Australia menjalankan programnya di Indonesia. Kontraktor ini bertanggungjawab kepada pihak Australia, dan bertugas untuk melapor kepada pihak Australia serta memberikan layanan bantuan sesuai dengan lingkupnya masing- masing. Dalam menyampaikan komponen Kontruksi dan Perluasan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Australia mempekerjakan SSQ Managing Contractor untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia dapat berjalan dengan efektif.

SSQ Managing Contractor bertugas untuk memberikan bantuan teknis dan memastikan dua hal, yaitu: (1) Kualitas sekolah sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan (2) Manajemen keuangan, bahwa semua dana digunakan untuk pembangunan sekolah. SSQ Managing Contractor merupakan pihak yang banyak terlibat dan bekerja sama secara langsung dengan Kemdikbud dan Komite Pembangunan Sekolah di masing-masing daerah (Australian DFAT, 2010).

Dalam komponen Kontruksi dan Perluasan Sekolah Menengah Pertama yang merupakan bagian dari Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, terdapat pembagian kerja yang adil antara masing-masing pihak yang terlibat, yang

telah ditetapkan dalam Australia's Education Partnership with Indonesia Design Document. Pemerintah Indonesia dan Australia bekerja sama sebagai mitra, di mana Pemerintah Indonesia membuat desain dan perencanaan program, yang kemudian didanai oleh Australia. Implementasi program ini dibantu oleh SSQ Managing Contractor untuk memastikan hasil dari program bantuan sesuai dengan kualitas yang ditetapkan (Saad, 2019).

Sementara itu, terkait pemantauan program, perwakilan dari Pemerintah Indonesia dan Australia membentuk tim pengawasan dan pemantauan yang disebut Performance Oversight and Monitoring (POM). Tim ini secara berkala meninjau pelaporan keuangan dan kinerja dari Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia. POM juga membuat laporan dan analisis kinerja tahunan dalam Annual Partnership Performance Report (APPR), yang berisi penilaian objektif atas pencapaian, kelemahan,

peluang, dan tantangan program. Hal ini dilakukan sebagai pengawasan terhadap bantuan Australian DFAT, sementara juga berupaya untuk menginformasikan keputusan manajemen program dan dialog strategis antara Pemerintah Indonesia dan Australia tentang kinerja dari program terkait (EP Performance Oversight and Monitoring, 2013).

Namun untuk pemantauan ke lapangan yang lebih intensif, Kemdikbud meminta bantuan dari Pemerintah Australia. Sesuai dengan permintaan Kemdikbud yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang ada, Pemerintah Australia kemudian menugaskan SSQ Managing Contractor untuk membuat tim pemantauan lapangan. Tim ini bertugas untuk memeriksa perkembangan dari konstruksi sekolah dan juga memeriksa dokumen keuangan untuk memastikan akuntabilitas dari dana bantuan dan hasil program sesuai dengan yang diinginkan.

a. Investasi Sumber Daya Bersama

Keterlibatan Pemerintah Indonesia dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan bersama dengan pihak Australia.

Selain itu, komunitas masyarakat setempat di berbagai kabupaten di Indonesia juga terlibat dalam Komite Pembangunan Sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawalan proses konstruksi sekolah. Komite Pembangunan Sekolah ditetapkan dengan memilih masyarakat sebagai anggota, yang dikepalai oleh seorang guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang kuat, terjadi nilai tambah yaitu bahwa konstruksi sekolah dilakukan “dari, oleh, dan untuk masyarakat” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016).

Prinsip konstruksi sekolah baru dengan partisipasi masyarakat ini yang menjadi ketertarikan bagi Pemerintah Australia, yang kemudian memberikan dana dan bantuan teknis kepada Indonesia untuk mendukung program yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia tersebut (Zufar, 2019). Bantuan teknis ini diberikan melalui SSQ Managing Contractor, yang membantu Kemdikbud mulai dari tahap penyediaan basis data untuk proposal pengajuan pembangunan sekolah,verifikasi dan pemilihan sekolah untuk dibangun, pengembangan materi teknis, pelatihan komite sekolah, hingga pemantauan ke lapangan secara rutin (Saad, 2019). Meskipun Australia memberikan bantuan teknis dan pendanaan, namun perencanaan program dan pelaksanaannya tetap secara utama dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan masyarakat di daerah setempat. Hal ini mencerminkan bahwa dalam pelaksanaannya, kemitraan ini menunjukkan adanya tingkat kepemilikan yang tinggi dari negara penerima bantuan yaitu Indonesia.

Dari sini dapat dilihat bahwa setiap pihak yang terlibat membawa sesuatu yang bernilai dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan perencanaan program dan prinsip partisipasi masyarakatnya, termasuk keterlibatan masyarakat daerah setempat dalam komite sekolah memperlihatkan sumber daya yang telah Indonesia ikut sertakan dalam kemitraan ini. Pemerintah Australia juga memberikan

sumber daya berupa dana dan bantuan teknis yang dalam penyampaiannya dilakukan oleh SSQ Managing Contractor. Dengan adanya investasi sumber daya bersama antara para pihak yang terlibat, terlebih lagi dengan tingkat kepemilikan tinggi negara Indonesia, membuat kemitraan dalam komponen Konstruksi dan Perluasan SMP di Indonesia menjadi lebih efektif.

c. Berbagi Pengambilan Risiko

Dalam pelaksanaannya, Konstruksi dan Perluasan SMP mengalami penyesuaian, terutama dengan adanya beberapa perubahan dari masing- masing negara. Pada tahun 2013, AusAID yang semula melaksanakan semua program bantuan luar negeri Australia

digabungkan menjadi bagian dari Australian DFAT, dikarenakan adanya "penyelarasan kebijakan luar negeri" untuk memberikan hasil yang lebih baik (Moore, R, 2019). Karena dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia telah ada kontrak yang disepakati, maka implementasinya tetap berjalan. Namun, terdapat penyesuaian yaitu pengurangan dana yang disebabkan oleh pengurangan dana bantuan luar negeri dari Pemerintah Australia (Saad, 2019).

Sementara itu, pada tahun 2015, Kemdikbud memiliki Renstra baru yakni Renstra 2015-2019. Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia juga pada awalnya direncanakan atas dasar Renstra 2011-2014 dan akan berakhir pada tahun 2014, namun dilakukan perpanjangan sehingga akhirnya berakhir pada tahun 2016. Oleh karena itu, dalam implementasinya perubahan Renstra tidak berpengaruh banyak karena tema keseluruhan dari Renstra Kemdikbud masih sama, yakni perluasan akses, peningkatan mutu, dan manajemen. Namun, pada Renstra 2015-2019 terdapat penekanan pada peningkatan mutu dan manajemen, dibandingkan dengan peningkatan akses seperti yang tercermin pada komponen Konstruksi dan Perluasan SMP (Zufar, 2019). Sehingga, berdasarkan laporan akhir Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, komponen ini dianggap mengalami penurunan relevansi terhadap prioritas kebijakan Pemerintah Indonesia (EP Performance Oversight and Monitoring, 2013).

Dalam menghadapi kendala yang ada selama pelaksanaan Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, Pemerintah Indonesia dan Australia bekerja secara kolaboratif. Kedua negara sering melakukan dialog karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain (Zufar, 2019). Dialog ini dilakukan untuk memastikan apa yang dibutuhkan dan bagaimana masing-masing pihak dapat bekerja sama untuk meningkatkan kinerja dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (Saad, 2019). Pemerintah Australia selalu menyesuaikan dan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Renstra, dan karena kegiatan ini berbentuk kemitraan maka keputusan yang ada juga diambil atas kesepakatan bersama (Adam, 2019).

Secara keseluruhan, berdasarkan laporan tahunan kinerja Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, dari tahun ke tahun terdapat peningkatan dalam pemilihan lokasi sekolah, pemantauan pembangunan sekolah, dan juga dalam sistem yang dirancang untuk pencegahan, deteksi, dan pengelolaan masalah penipuan dan ketidakpatuhan. Peningkatan ini menghasilkan sekolah-sekolah yang berkualitas lebih baik, di lokasi yang lebih tepat, dan berkurangnya risiko fidusia. Komponen Konstruksi dan Perluasan SMP dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia berhasil mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang patut dipuji untuk kegiatan di suatu bidang yang rentan terhadap penyalahgunaan pendanaan (EP Performance Oversight and Monitoring, 2013).

d. Keuntungan Bersama

Pemerintah Indonesia jelas diuntungkan dengan berhasil dibangunnya 1,155 unit SMP di bawah Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, sehingga apabila dijumlahkan dengan unit SMP yang dibangun di bawah AIBEP, maka terdapat 2.725 unit SMP baru (Zufar, 2019). Sekolah yang dibangun juga memiliki kualitas yang lebih tinggi, termasuk bangunannya yang tahan gempa dan ramah disabilitas, dikarenakan adanya bantuan teknis dari Australia yang diberikan melalui SSQ Managing Contractor (Saad, 2019). Dengan dibangunnya 1.155 unit SMP baru, akses pendidikan di Indonesia juga semakin meningkat, ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMP yang semula pada tahun 2010 sebesar 98,20%, menjadi 100,72% pada tahun 2015. Di samping keuntungan dari segi jumlah dan kualitas unit sekolah baru dan peningkatan akses siswa SMP, Indonesia dalam hal ini

Kemdikbud juga merasa diuntungkan dengan adanya model kemitraan seperti yang dijalankan dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia. Program Adviser dari Kemdikbud menganggap model pembangunan melalui kemitraan ini sebagai model yang paling ideal, di mana kerja sama antara Indonesia dan Australia sangat kolaboratif, dan Indonesia memiliki tingkat kepemilikan yang tinggi dalam kemitraan ini (Zufar, 2019).

Sementara itu, Pemerintah Australia diuntungkan dengan adanya Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia karena bantuan luar negeri yang mereka berikan dianggap memuaskan dan bahwa dana yang diberikan berhasil digunakan dengan baik. Pencapaian dari Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri bagi Australia karena berhasil berkontribusi terhadap program Wajib Belajar 9 Tahun dan mendukung Renstra Indonesia (Saad, 2019). Ketika Pemerintah Indonesia mencontoh bagaimana Konstruksi dan Perluasan SMP dilakukan berdasarkan bantuan dari Australia dan memakainya secara berkelanjutan, maka hal ini menjadi sebuah pencapaian bagi Pemerintah Australia (Adam, 2019). Meskipun adanya pengurangan dalam jumlah sekolah yang dibangun, komponen Konstruksi dan Perluasan SMP dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia dianggap sebagai investasi yang baik bagi Pemerintah Australia, yang berhasil memberikan dampak nyata pada sektor pendidikan di Indonesia (EP Performance Oversight and Monitoring, 2013).

Bantuan Australia untuk Konstruksi dan Perluasan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bogor melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia sebagai Dukungan Australia terhadap Pembangunan Pendidikan di Indonesia

Bantuan Australia untuk Konstruksi dan Perluasan SMP melalui Kemitraan Pendidikan Australia- Indonesia sesuai dengan salah satu perspektif dalam pembangunan internasional menurut Sumner dan Triber (2008), di mana pembangunan internasional berkaitan dengan kebijakan dan bersifat evaluatif atau dipimpin oleh indikator tertentu yang didasarkan pada penilaian, dan memiliki tujuan berjangka pendek hingga menengah. Karakteristik dari perspektif ini yaitu bahwa perspektif ini berfokus pada hasil dari perubahan sehingga memiliki pandangan yang relatif berjangka pendek. Perspektif ini memandang pembangunan berlangsung dalam serangkaian ‘indikator kinerja’ yang berupa tujuan atau hasil berjangka pendek hingga menengah, yang dapat diukur dan dibandingkan dengan target-target tertentu (Sumner, A & Tribe, M., 2008).

Dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, digunakan indikator-indikator tertentu dalam menentukan kesuksesan kemitraan untuk pembangunan. Indikator yang digunakan dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia yakni Wajib Belajar Sembilan Tahun yang juga tercantum dalam Renstra Kemdikbud tahun 2010- 2014. Tujuan-tujuan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas peserta didik usia SMP yang merupakan tujuan berjangka pendek hingga menengah, dikarenakan ketika Kemdikbud memperbaharui Renstra, tujuan-tujuan yang ada sudah berbeda dengan sebelumnya meskipun temanya tetap sama (Zufar, 2019). Dengan ditetapkannya tujuan-tujuan tersebut, Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia memiliki indikator yang lebih terukur dan memudahkan praktik pemberian bantuan serta hubungan kemitraan yang berlangsung untuk pembangunan di Indonesia.

Alasan dijalinnya Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia antara kedua negara tersebut juga mencerminkan definisi pembangunan pendidikan yang dikemukakan oleh McCowan dan Unterhalter (2015), yang menyatakan bahwa terdapat dua hubungan utama yang dapat diobservasi antara

pendidikan dan pembangunan internasional. Pertama, bahwa pembangunan mencakup pendidikan, di mana pendidikan merupakan sebuah bagian dari pembangunan. Dan kedua, bahwa pendidikan mendorong pembangunan. Dalam praktiknya, kedua hubungan ini dianggap saling berkaitan (McCowan & Unterhalter, 2015).

Hubungan pertama yaitu pendidikan merupakan bagian dari pembangunan, di mana pendidikan dipandang sebagai salah satu lembaga masyarakat yang bertambah baik seiring dengan tingkat pembangunan suatu negara (McCowan & Unterhalter, 2015). Dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha untuk memperbaiki pembangun pendidikan di negaranya. Hal ini tercermin dari upaya Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar bagi semua anak di Indonesia dengan membangun sekolah-sekolah baru. Salah satu upaya Indonesia selain melalui APBNnya adalah dengan menerima bantuan luar negeri dari Pemerintah Australia (Zufar, 2019). Bantuan pendidikan sendiri merupakan sektor utama dari program bantuan luar negeri Pemerintah Australia (Carr, B, 2012).

Hubungan kedua yaitu pendidikan mendorong pembangunan, di mana tingkat pendidikan suatu masyarakat dianggap menentukan pertumbuhan ekonomi, demokratisasi, dan berbagai hasil positif lainnya (McCowan, A & Unterhalter, E, 2015). Dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, Pemerintah Australia percaya bahwa pendidikan yang baik akan mendorong prospek perekonomian Indonesia dan membuat tenaga kerja yang kompetitif (Saad, 2019). Sehingga, Australia mendukung Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negaranya, yang pada akhirnya diharapkan akan berkontribusi di ranah regional dan akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Adam, 2019). Pemerintah Indonesia juga beranggapan bahwa pendidikan merupakan salah satu investasi pembangunan terbaik yang membantu mencapai hasil pembangunan lainnya. Pendidikan menjadi dasar dari pertumbuhan, stabilitas, kesetaraan, dan kuatnya hubungan di dalam masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016).

Adanya kedua hubungan dalam pembangunan pendidikan mencerminkan bahwa berlangsungnya Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia didasarkan atas pandangan bahwa pendidikan merupakan bagian dari pembangunan, dan bahwa pendidikan mendorong pembangunan itu sendiri. Pembangunan dalam hal yaitu peningkatan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, stabilitas, kesetaraan, dan hubungan di dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Pembangunan pendidikan merupakan hal yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Komitmen negara-negara di seluruh dunia bagi pembangunan pendidikan dapat dilihat dengan adanya tujuan kedua MDGs yang berbunyi "Mewujudkan Pendidikan Dasar untuk Semua." Indonesia turut menjadi bagian dari negara-negara yang berkomitmen untuk mewujudkan tujuan tersebut, yang ditunjukkan dengan dibentuknya program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Akan tetapi, dengan luasnya wilayah Indonesia, penyediaan layanan pendidikan dasar bagi semua anak-anak terbukti sebagai hal yang tidak mudah. Rendahnya angka partisipasi siswa tingkat SMP merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Bahkan di Kabupaten Bogor, yang merupakan daerah penyangga bagi DKI Jakarta, aksesibilitas dan pemerataan pendidikan dasar masih menjadi permasalahan, sehingga Wajib Belajar Sembilan Tahun belum berhasil tercapai.

Pada tahun 2011 hingga 2016, Pemerintah Australia, dengan pendidikan sebagai sektor utama bantuan luar negerinya, memberikan bantuan luar negeri berbentuk kemitraan

kepada Pemerintah Indonesia. Bantuan dalam bentuk hibah dan bantuan teknis yang diberikan Pemerintah Australia melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia merupakan sebuah bentuk dukungan bagi Pemerintah Indonesia untuk mencapai Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Renstra Kemdikbud. Komponen utama dari Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia yaitu Konstruksi dan Perluasan SMP, melanjutkan dari keberhasilan AIBEP.

Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia merupakan bantuan luar negeri Pemerintah Australia yang berkontribusi besar bagi pembangunan pendidikan di Indonesia, dan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Pemerintah Australia memberikan bantuan melalui Australian Aid dan dibantu oleh SSQ Managing Contractor, yang bekerja sama dengan Kemdikbud. Dengan adanya prinsip partisipasi masyarakat yang dipegang oleh Kemdikbud, masyarakat Indonesia juga turut berpartisipasi dalam Konstruksi dan Perluasan SMP melalui komite sekolah.

Berdasarkan dimensi-dimensi kemitraan, melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia, Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia telah menjalin kemitraan yang baik. Pemerintah Indonesia sepenuhnya menentukan perencanaan dan desain program-program pembangunan, dan Pemerintah Australia mendukung melalui hibah dan bantuan teknis, dengan bantuan dari SSQ Managing Contractor.

Selanjutnya, pemantauan dilakukan melalui tim gabungan yang disebut POM untuk memastikan agar program berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Semua pihak yang terlibat memiliki peran pentingnya masing-masing,an Indonesia memiliki tingkat kepemilikan yang tinggi dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia. Walaupun begitu, terjadi beberapa perubahan Sembilan Tahun belum berhasil tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, M. (2019, May 15). Bantuan Australia untuk Konstruksi dan Perluasan SMP melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia. (A. P. Ramadhina, Interviewer)

ASEAN. (2013). *ASEAN State of Education Report 2013*. Jakarta: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

AusAID. (2006). *Australian Aid: Promoting Growth and Stability. A White Paper on the Australian Government's Overseas Aid Program*. Canberra: AusAID.

Australian DFAT. (2010). *Australia's Education Partnership with Indonesia Design Document*. . Canberra: Australian DFAT.

Australian DFAT. (2013). *Aid Program Performance Report 2012-13 Indonesia*. Canberra: Australian DFAT.

Australian DFAT. (2014). *Australia's Education Partnership with Indonesia: Frequently asked questions*. Canberra: Australian DFAT.

Awan, M. S., Malik, N., Sarwar, H., & Waqas, M. (2011). Impact of Education on Poverty Reduction. *International Journal of Academic Research, 3*(1).

Carr, B. (2012). *Aid Budget Statement 2012-13*.Canberra: CANPRINT Communications.

Davis, Davis, T. (2006). Does Australia have an international development assistance policy? National interest and foreign aid policy making. Dalam *Proceedings, Second Oceanic Conference on International Studies*. Melbourne: University of Melbourne, hlm.1-30.

Demirjian, A. (2002). *Partnering in Support of International Development Initiatives: The INTOSAI Case Study*. Ottawa: Consulting and Audit Canada.

Eldridge, P. (1971). Australian aid to Indonesia: Diplomacy or Development?. *Australian Outlook*, 25(2). Canberra: Australian Institute of International Affairs, hlm.141-158.

EP Performance Oversight and Monitoring. (2013). *Australia's Education Partnersip with Indonesia: Independent Completion Repor*. EP Performance Oversight and Monitoring.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2015). *Program Pembangunan USB dan Pengembangan SD SMP Satu Atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat.* Jakarta: Dipresentasikan pada: Pendantangan Dokumen Perjanjian Pemberian Bantuan Program Pembangunan USB SMP dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Jakarta 12-13 Mei 2015. .

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). *10 Tahun Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia.* Tidak dipublikasikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). *Pembangunan Sekolah Kerja Sama Indonesia-Australia Full Version*. Retrieved June 17, 2019, from Youtube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: https://youtu.be/Vtjji-KCGxA Lancaster, C. (2007). *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics.* Chicago: University of Chicago Press.

Lisbet. (2015). Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran. *Info Singkat Hubungan Interna sional*, VII(9). Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.

McCowan, A & Unterhalter, E. (2015). Education *and International Development: An Introduction*. London: Bloomsbury.

Moore, R. (2019). *Reset required for DFAT-AusAID integration.* Retrieved June 18, 2019, from Lowy Institute: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/reset-required-dfat-ausaid-integration

Morse, S., & McNamara, N. (2006). Analysing Institutional partnership in development: a contract between equals or a loaded process?,. *Progress in Development Studies*, *6*(4), 321-336.

Saad, J. (2019, May 15). Bantuan Australia untuk Konstruksi dan Perluasan SMP melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia. (A. P. Ramadhina, Interviewer) Sumner, A & Tribe, M. (2008). *International Development Studies: Theories and Methods in Research and Practice*. London: SAGE Publications. The Parliament of the Commonwealth of Australia. (2004). *Near Neighbours – Good Neighbours: An Inquiry into Australia's Relationship with Indonesia.* . Canberra: Commonwealth of Australia.

UNDP Indonesia. (2008). *Mari Kita Suarakan MDGs*. Jakarta: UNDP Indonesia.

Zufar, A. (2019, May 23). Bantuan Australia untuk Konstruksi dan Perluasan SMP melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (A.P. Ramadhina, Interviewer)

BIOGRAFI

Annisa Prima Ramadhina lulusan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (2019).

Teuku Rezasyah adalah dosen pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.

Dina Yulianti adalah dosen pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.

`